

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NOMOR...TAHUN...
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK
KEPENTINGAN

KATA PENGANTAR

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang

Penanganan Konflik Kepentingan ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Selain itu juga sebagai pedoman pengelolaan konflik kepentingan agar dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.

Purwodadi, 29 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos., M.M.
NIP. 19720409 199203 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
B. Ruang Lingkup Materi	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Simpulan	5
B. Saran.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Grobogan dan dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya konflik kepentingan dari Aparatur Sipil Negara dalam pengambilan keputusan atau dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan Pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam Penanganan konflik kepentingan di lingkungan kabupaten grobogan

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diharapkan dalam hal ini dapat menjadi pedoman penanganan konflik kepentingan yang merupakan acuan bagi Pejabat Pemerintah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan pedoman penanganan konflik kepentingan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

C. Tujuan Penyusunan

Sebagai Pedoman pejabat pemerintah untuk penanganan konflik kepentingan sehingga dapat menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan, meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara, meningkatkan integritas dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan konflik kepentingan merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penanganan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Kepentingan bertujuan sebagai kerangka acuan bagi Pejabat Pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan, memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pengeolaan konflik kepentingan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pejabat pemerintahan dalam mengelola konflik kepentingan, memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintah yang berintegritas, dan mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan konflik kepentingan oleh Pemerintah Daerah. Sasaran yang dicapai dalam penanganan konflik kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya konflik kepentingan yang dihadapi Pejabat Pemerintah. Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan tentang pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pelaksanaan sistem pengelolan konflik kepentingan, pengawasan pengelolaan konflik kepentingan, sanksi dan apresiasi serta monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Kepentingan secara umum mengatur tentang pedoman tentang pengelolaan konflik kepentingan Pejabat Pemerintah dengan harapan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Kepentingan ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari ketentuan berbunyi sebagai berikut; B :

1. BAB I berisi tentang pengertian Konflik Kepentingan dan tujuan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
2. BAB II konflik kepentingan
 - a. Bagian kesatu tentang jenis konflik kepentingan;
 - b. Bagian kedua tentang sumber dan bentuk konflik kepentingan;
3. BAB III Pengelolaan konflik kepentingan;
 - a. Bagian Kesatu tentang pengelolaan konflik kepentingan;
 - b. Bagian Kedua tentang pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan;
 - c. Bagian Ketiga tentang pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan;
 - d. Bagian Keempat tentang pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan;
 - e. Bagian Kelima tentang monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan;
 - f. Bagian keenam tentang apresiasi pengelolan konflik kepentingan;
 - g. Bagian Ketujuh tentang apesiasi pengelolaan konflik kepentingan,
4. Lampiran mekanisme pengelolaan konflik kepentingan;
 - a. Tujuan pengelolaan konflik kepentingan;
 - b. Jenis konflik kepentingan;

- c. Sumber dan contoh konflik kepentingan;
- d. Lampiran formulir daftar konflik kepentingan;
- e. Formulir deklarasi konflik kepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini diharapkan mampu memberikan pedoman oleh Pejabat Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta menjaga integritas dan kredibilitas Pemerintah Daerah. Selain itu diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan situasi dimana kepentingan pribadi atau kelompok dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penanganan Konflik Kepentingan dapat segera selesai sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan konflik kepentingan mengingat Peraturan Bupati ini sebagai salah satu hal inti dalam pelaksanaan berjalannya sistem pemerintahan. Setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah